

Dialog Antar Agama Sebagai Praksis dan Disiplin

Oleh Hairus Salim

Dalam dasawarsa belakangan ini, kegiatan dialog antar agama di kalangan masyarakat kian meluas. Di beberapa tempat didirikan lembaga-lembaga dialog antar agama. Para pemimpin agama, lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan mulai memberi perhatian yang besar terhadap pentingnya peningkatan hubungan antar agama yang harmonis dan pluralistik. Yang lebih penting lagi, minat dialog ini tidak saja datang dari kalangan agama secara formal, tapi juga kalangan yang selama ini tak begitu akrab dengan manifestasi-manifestasi keagamaan formal. Kesadaran terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik dari segi agama dan besarnya permasalahan kemanusiaan yang universal, membuka mata kalangan agama khususnya, dan masyarakat secara umum untuk dialog, membina saling pengertian dan sekaligus mencari pemecahan bersama terhadap problem kemanusiaan universal.

Jika dicermati lebih lanjut, tampak pula bahwa fenomena ini bukan semata meluasnya dialog antar agama, tapi juga memperlihatkan adanya perspektif dan pola-pola baru dalam praktek dialog tersebut, yang berbeda dengan praktek dialog sebelumnya. Sekaligus memperlihatkan perspektif dan pola yang berbeda dengan praktek dialog sebelumnya, dialog antar agama yang muncul belakangan ini juga mampu memperlihatkan tantangan kemanusiaan

yang di hadapi manusia, dan tugas profetis apa yang menjadi tanggung jawab agama. Untuk mengetahui lebih lugas sosok fenomena ini terlebih dahulu perlu ditelusuri secara spintas lalu jejak-jejak praktek dialog, hingga dalam bentuknya seperti sekarang ini.

Kegiatan dialog antar agama di Indonesia pertama kali diselenggarakan dan dirasakan signifikansinya pada awal-awal pendirian Orde Baru. Konsolidasi agama-agama, yang

direfleksikan dengan gencarnya rekrutmen pemeluk dan pendirian tempat ibadah, menyusul dilarangnya komunisme, ternyata mengakibatkan konflik dan ketegangan antar agama di berbagai tempat di Indonesia. Kerangka ketegangan ini mencuat dalam bentuk aksi-aksi perusakan tempat-tempat ibadah dari derasnya penerbitan-penerbitan yang bersifat apologis dan polemis di kalangan agama-agama pada akhir 1960-an dan awal 1970-an.

Ada tiga sebab mengapa konflik agama di masa Orde Baru sering terjadi, khususnya sejak tahun 1967 hingga akhir 1970-an. Pertama, adalah karena diakuinya secara resmi agama-agama pada masa awal Orde Baru. Hal ini merupakan reaksi balik terhadap peranan PKI pada masa awal orde sebelumnya, yang secara implisit maupun eksplisit, maka terjadi proses intensifikasi penyebaran dan pendalaman agama, yang berpengaruh pada hubungan antar agama.

Penulis adalah aktivis pada Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LK/S) dan Interfidal Yogyakarta

Sebagai akibatnya, maka terjadi kontestasi agama-agama dalam merekrut penganut baru. Pada umumnya yang menjadi sasaran persaingan rekrutmen ini adalah kalangan abangan dan para penganut agama suku di luar Jawa.

Sebab kedua dari terjadinya konflik agama adalah internasionalisasi kehidupan beragama, termasuk penyebarannya. Tetapi, selama periode Demokrasi Parlementer, dan terutama lagi Demokrasi Terpimpin, penyebaran agama dengan batuan asing sangat dibatasi. Tetapi sejak 1966, seiring dengan inkorporasi Indonesia ke dalam sistem dunia, mengalir deras bantuan-bantuan untuk pengembangan semua agama. Jika kalangan Katolik maupun Kristen dana bantuannya datang dari negara-negara di Eropa, maka Islam mendapat bantuan dari negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah. Situasi ini memunculkan ketegangan dan bahkan konflik yang terbatas di kalangan agama-agama.

Sementara sebab ketiga adalah konsekuensi dari hasil pembangunan Orde Baru itu sendiri. Di kalangan agama-agama, muncul kelas-kelas baru yang ikut mendukung kegiatan keagamaan. Maka di sana-sini, muncul kegiatan-kegiatan keagamaan yang semarak, baik yang bersifat fisik maupun ritual formal, berkat dukungan materi yang besar ini. Sering akhirnya, manifestasi-manifestasi keagamaan ini dianggap bersifat eksklusif dan "memanas-manasi", yang kemudian muncul konflik-konflik (lihat Burhan D. Magenda, 1990).

Demikianlah, seperti disebut Burhan D. Magenda, dan juga Arief Budiman (1994), konflik-konflik keagamaan ini sepenuhnya merupakan produk Orde Baru karena pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin hampir-hampir tidak ada konflik agama yang timbul. Karena konflik tersebut khas Orde Baru, maka dialog antar agama pada awal inipun bersifat khas Orde Baru pula.

Pemerintah, yang saat itu membutuhkan stabilitas untuk menegakkan sendi-sendi politik dan ekonomi, akhirnya perlu memprakarsai suatu pertemuan yang disebut musyawarah antar-agama, yang diselenggarakan di Jakarta pada 30 November 1968, untuk memperbaiki hubungan yang tegang antara berbagai

Ada tiga sebab mengapa konflik agama di masa Orde Baru sering terjadi, khususnya sejak tahun 1967 hingga akhir 1970-an. Pertama, adalah karena diakui secara resmi agama-agama.

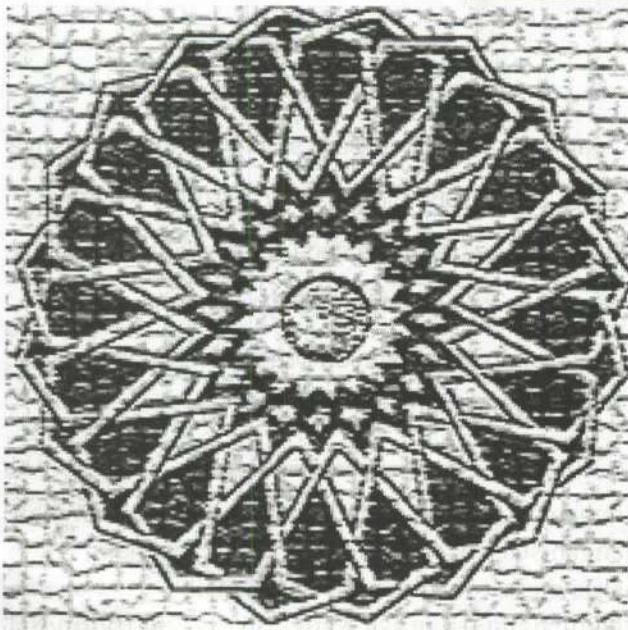
Sebab kedua dari terjadinya konflik agama.

Sebab ketiga adalah konsekuensi dari hasil pembangunan Orde Baru itu sendiri

umat beragama. Kendati musyawarah ini berakhir dengan suasana yang kurang menyenangkan, tetapi harus dicatat itulah awal sejarah dialog antar agama dalam pengertiannya yang formal di Indonesia (Boland, 1986). Selanjutnya pemerintah terus membina dialog antar agama. Tetapi sering dialog ini lebih bersifat formal belaka, karena dalam banyak kasus negara langsung melakukan intervensi untuk meredakan ketegangan dan mencegah terjadinya konflik. Harus diakui, dalam jangka pendek, intervensi negara melalui sejumlah perundangan dan ketentuan yang ditetapkan, mampu mengatasi ketegangan dan konflik keagamaan tersebut.

Sejak saat itu, pemerintah melalui Departemen Agama, terus memprakarsai dialog dan mempromosikan kerukunan antar agama. Kegiatan dialog ini makin intensif, ketika Prof. Dr. A. Mukti Ali mulai memangku jabatan Menteri Agama tahun 1971. Sejak itu dialog diprogramkan dan merupakan kegiatan utama dari Proyek Kurukunan Hidup Beragama Departemen Agama. Di antara corak menonjol kegiatannya adalah penyelenggaraan pertemuan antarpemuka masing-masing agama, training dan Darmabakti Keagamaan.

Hingga kini Departemen Agama tetap terus memprogramkan dialog antar agama dan mempromosikan kerukunan. Mungkin inilah satu-satunya program dari departemen dalam pemerintahan yang secara konsisten terus dijalankan, kendati sudah terjadi beberapa kali pergantian menteri. Rupanya dialog antar agama merupakan program wajib dari



Sumber: Dok. Lukpendam

Departemen Agama. Sekarang ini, penggalan dialog antar agama Departemen Agama dilakukan melalui, di antaranya, badan otonomnya, Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB).

Selain sisa-sisa dari konflik dan ketegangan yang muncul secara historis tersebut, problem yang menyangkut hubungan antar agama ini adalah munculnya fenomena kebangkitan agama-agama. Kebangkitan agama-agama ini secara umum didorong oleh terjadinya krisis modernitas. Dalam banyak pandangan kalangan agama, modernitas telah gagal menjadi pembimbing kehidupan. Modernitas lebih banyak meninggalkan kesenjangan, kemiskinan, eksploitasi dan berbagai penyakit-penyakit kemanusiaan lainnya. Dalam konteks kesadaran inilah, agama-agama bangkit untuk mengambil alih peranan ideologi-ideologi modern tersebut. Agama-agama hadir dengan kritiknya yang tajam terhadap ideologi-ideologi modern, sekaligus menawarkan diri sebagai kekuatan pembebas dari belenggu kenistaan, material maupun spiritual, yang diakibatkan oleh modernitas tersebut.

Keinginan untuk hadir sebagai kekuatan transformatif ini, membuka mata kalangan agama-agama untuk melakukan dialog. Inisiatif ini bermula dari kesadaran bahwa pada dasarnya problem-problem

kemanusiaan universal tersebut telah mejadi keprihatinan bersama. Sementara itu pada esensinya, agama-agama sama-sama membawa misi pembebasan.

Tetapi di sisi lain, kebangkitan agama-agama ini memperlihatkan juga suatu fenomena penegasan identitas, yakni munculnya agama sebagai identitas, yang ujungnya seringkali memunculkan “fundamentalisme”. Kebangkitan agama dipahami sebagai suatu kebangkitan agama-manya an sich, berhadapan dengan agama dan ideologi dunia lain. Fundamentalisme ini mengklaim hanya pemahaman agama mereka yang benar dan yang berhak mengemban misi profetis dan transformatif terhadap dekadensi dunia ini. Fundamentalisme merupakan tantangan terhadap agama-agama yang berorientasi inklusif, karena fundamentalisme sering membawakan kekerasan untuk merealisasikan gagasannya.

Situasi-situasi ketegangan hubungan antar agama pada masa awal Orde Baru hingga sekarang masih ada, bahkan semakin berekskalasi dan telah mencapai tahap yang mengawatirkan. Dengan demikian, perspektif, alasan dan pola-pola dialog yang lama, untuk kepentingan jangka panjang, jelas tak bisa dipertahankan lagi. Selain itu, untuk menjawab krisis modernitas, mengerasnya kapitalisme dan tantangan fundamentalis, perlu juga dilakukan suatu dialog yang berangkat dari wawasan global. Karena itulah berkembang kegiatan dialog yang marak dalam dasawarsa belakangan ini, yang murni lahir dari inisiatif masyarakat sendiri. Katakanlah terjadi “swastanisasi” dialog antar agama.

Terbatasnya —baik materi, capian yang hendak dituju maupun mereka yang terlibat dalam— dialog-dialog antar agama yang diprakarsai pemerintah, membuka inisiatif masyarakat untuk menggelar kegiatan dialog sendiri yang dirasa jauh lebih memuaskan dan berjangkauan luas. Memang, mereka yang terlibat, langsung maupun tidak langsung dalam dialog antar agama akan merasakan adanya nuansa-nuansa yang berbeda antara keduanya. Jika dialog antar agama yang pertama, pesertanya biasanya hanya “dibatasi” pada para pemimpin

keagamaan tingkat nasional maupun regional, terbatas pada para ulama atau para teolog saja, dengan pemerintah berdiri di tengah-tengahnya, maka dialog yang kedua lebih bersifat informal.

Seterusnya, jika kita menelusuri tema-tema dialog yang pertama, tampak dialog tersebut dengan alasan-alasannya sendiri mencoba menghindari perbincangan aspek-aspek teologis, maupun faktor-faktor politik ekonomi. Temanya terbatas pada masalah-masalah sosial yang bersifat praktis dan berjangka pendek. Dialog lebih diarahkan pada kebutuhan akan stabilitas keamanan dan dukungan legitimatif agama-agama untuk program pembangunan dan kebijakan pemerintah. Dialog lebih dimaksudkan untuk menunda konflik. Tema-tema dialog antar agama tahun 1970-an misalnya, kerukunan dan toleransi umat beragama, kode etik pergaulan dan penyebaran agama, nilai-nilai agama dalam pembangunan, agama, program keluarga berencana dan pendidikan kependudukan, peranan tokoh-tokoh agama dalam membangun masyarakat, motivasi agama untuk pembinaan koperasi dan lain-lain (Djohan Effendi, 1985). Tak mengherankan kalau dialog ini lebih mengarah pada tercapainya konsesi-konsesi yang bersifat formal-politis.

Berbeda dengan kecenderungan dialog pertama tersebut, dialog kedua ini mencoba membicarakan hubungan antar agama sebagai suatu masalah yang kompleks dan internal, dengan tidak mengisolasi dari problem-problem teologi, sosial, maupun, — terutama— ekonomi politik. Tujuan yang dirumuskan lebih berjangka panjang. Yang dicari bukanlah konsesi-konsesi, tetapi suatu pemahaman bersama yang dipupuk dari dialog terus-menerus. Karena konteks kebutuhan dialog tidak semata diangkat dari latar internal Indonesia, tetapi juga global, maka tema yang diangkat lebih visioner, dengan menempatkan problem-problem kemanusiaan universal sebagai masalah bersama yang mesti dihadapi secara bersama pula. Sementara, berhadapan dengan berbagai kebijakan pemerintah secara umum, maupun khususnya kebijakan menyangkut agama-agama, dialog kedua ini cenderung bersikap kritis.

Selama ini pandangan masing-masing umat beragama terhadap umat yang lain terbangun secara mediatik, yakni melalui sebuah “medium” yang sesungguhnya tidak netral terhadap kepentingan hubungan antar agama itu sendiri. Medium inilah yang menciptakan cermin-cermin proyeksi suatu agama terhadap agama yang lain dan menggariskan batas-batas yang mesti dicapai, dan sekaligus tidak boleh dilampaui oleh, dialog-dialog antar agama. Masing-masing agama memandang satu sama lain melalui cermin proyeksi tersebut. Sebuah cermin, bagaimanapun, hanya memperlihatkan bagian depan dan permukaan dari suatu bangunan tubuh. Deskripsi yang ditangkap jelas hanya parsial dan tidak menyeluruh. Dalam konteks hubungan antar agama, proyeksi melalui cermin buatan ini, lebih banyak menyuburkan prasangka dari pada saling pengertian. Dialog dengan pola kedua ini, mencoba memecahkan cermin-cermin proyeksi tersebut, dengan menciptakan hubungan langsung tanpa perantara. Perantara atau mediator ini boleh disebut “negara”, tapi bisa

Selama ini pandangan
masing-masing umat beragama
terhadap umat yang lain
terbangun secara mediatik,
yakni melalui sebuah “medium”
yang sesungguhnya tidak netral
terhadap kepentingan
hubungan antar agama
itu sendiri.

Kebutuhan dialog tidak lagi sekedar membina toleransi dan hidup berdampingan secara damai, tetapi lebih mengarah pada cita-cita terbentuknya masyarakat pluralisme sejati. Pluralisme yang dimaksud tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, tetapi lebih pada keterlibatan aktif dalam realitas kemajemukan tersebut

juga elit politik, ekonomi, bahkan elit agama itu sendiri, yang kerana kepentingan-kepentingan politik membangun cermin-cermin proyeksi tersebut. Dengan tetap menghargai prakarsa-prakarsa dialog antar agama dari pemerintah, dialog kedua tampak memperlihatkan suatu kemajuan yang lebih berarti dan menjanjikan.

Kebutuhan dialog tidak lagi sekedar membina toleransi dan hidup berdampingan secara damai, tetapi lebih mengarah pada cita-cita terbentuknya masyarakat pluralisme sejati. Pluralisme yang dimaksud tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, tetapi lebih pada keterlibatan aktif dalam realitas kemajemukan tersebut. Dengan demikian, pluralisme di situ juga tidak sama dengan kosmopolitanisme, yang menunjuk adanya suatu realita aneka ragam agama, ras, dan bangsa yang hidup berdampingan di suatu

kawasan, namun tak ada interaksi positif antar penduduknya (Alwi, 1997, h. 41-2).

Selain itu, dialog antar agama kini telah diletakkan dalam bagian penting dalam program demokrasi. Ada perasaan bahwa agama-agama bisa menjadi kekuatan integrasi, tetapi lebih jauh mendalam kesadaran bahwa agama-agama sangat potensial menjadi kekuatan pemecah belah. Dalam masyarakat multi agama seperti Indonesia, di mana kesadaran dan pengalaman beragama sungguh-sungguh menjadi titik tolak dalam bertindak, suatu perdamaian agama menjadi sangat krusial. Maka semboyan Hans Kung, "Tak ada kelangsungan hidup tanpa etika dunia. Tak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama. Tak ada perdamaian agama tanpa dialog agama-agama", menemukan gemanya.

Lebih jauh lagi, tujuan dialog juga tidak sekedar perdamaian. Karena tak ada artinya perdamaian tanpa keadilan. Dengan dialog, agama-agama membicarakan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap krisis kemanusiaan. Lewat dialog pula, agama menggagas perspektifnya mengenai orde masa depan yang adil dan sejahtera. Suatu masa depan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang disertai kebijakan etis, ketinggian teknologi yang dibarengi dengan energi spiritual, meningkatnya industri dengan kepedulian pada lingkungan dan kesadaran berdemokrasi dengan moralitas sebagai parameternya.

Pendirian lembaga-lembaga seperti Dian\Inter-fidei (Dialog Atariman) di Yogyakarta, MADIA (Masyarakat untuk Dialog antar Agama) di Jakarta dan MLA (Majlis Lintas Agama) di Surabaya, serta berbagai institusi sejenis, adalah bagian penting dari fenomena dialog antar agama pola kedua ini. Kecenderungan mereka tampaknya mengarah pada perkembangan dialog di manca negara. Seperti pernah ditulis St. Sunardi (1996), di berbagai negara kini sedang bertumbuh semangat untuk melakukan dialog antar agama. Dialog antar agama telah menjadi life-style kalangan gereja (agamawan). Keinginan dan perilaku orang akan dialog bahkan sudah menyerupai perilaku orang-orang yang fanatik dengan restoran Mc.Donald. Dalam suasana seperti itulah berdiri

lembaga-lembaga dialog antar agama seperti The Good Way (Swiss), Call of Hope (Jerman), Fellowship of Faith for Muslim (Canada), Fellowship of Isa (Amerika), Christian Centre (India), Henry Martyn Institute of Islamic Studies (India), L. Feldman (Perancis), Center for Study of World Religion, Harvard University (Amerika), Center for the Study of Islam and Christian Muslim Relations (Inggris) dan lain-lain.

Bahkan, seperti juga rekan-rekannya di manca negara tersebut, lembaga-lembaga baru dialog antar agama ini, selain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dialog itu sendiri, juga melakukan pengkajian dan penelitian menyangkut hubungan antar agama dan berbagai aspek yang terkait dengannya. Melimpahnya produksi intelektual menyangkut antar agama dalam lima tahun terakhir ini jelas memperlihatkan kuatnya kecenderungan ini. Tampaknya dialog antar agama bukan sekedar praksis kegiatan, tapi juga hendak dijadikan semacam disiplin. Seperti disebut St. Sunardi, dialog (Kristen-Islam) di pusat-pusat pendidikan teologi kini menjadi salah satu mata kuliah. Mata kuliah ini bahkan mulai menggeser reputasi fakultas-fakultas misiologi. Sementara itu, menurut Alwi Shihab (1997, h.48), dialog antar agama merupakan disiplin paling mutakhir yang muncul menyusul sosiologi agama, psikologi agama dan fenomenologi agama, yang tampaknya merupakan akibat dari kebuntuan teoritis dalam, dan bagian dari, perkembangan studi agama-agama sebelumnya.

Munculnya dialog antar agama sebagai disiplin jelas menarik. Tetapi, mungkin saya agak berbeda dengan pengertian "disiplin" yang dideskripsikan di atas. Pemahaman saya yang terbatas menangkap

bahwa disiplin yang di maksud di atas, murni sebuah disiplin dalam ilmu agama-agama yang berperspektif antar agama dan diharapkan sungguh-sungguh bisa memberi kontribusi untuk dialog antar agama. Disiplin ini muncul sebagai jawaban terhadap disiplin-disiplin agama seperti "ilmu perbandingan agama" atau "sejarah agama", "misiologi" atau "ilmu dakwah", yang agak kurang berperspektif antar agama, dan sumbangannya sangat terbatas untuk dialog antar agama, bahkan mungkin berlawanan dengan semangat dialog antar agama. Jadi "dialog antar agama sebagai disiplin" di situ sangat berorientasi teologis.

Sementara "dialog antar agama sebagai disiplin" yang saya bayangkan sedikit melampaui perspektif di atas. Ia tidak semata suatu disiplin yang dari sudut masing-masing teologi bersifat inklusif dan saling memperkaya. Tetapi ia juga sebuah disiplin yang jauh

lebih luas dari sekedar masalah-masalah teologi. Ia meliputi suatu studi sejarah hubungan antar agama, studi terhadap kapitalisme, hak asasi manusia dan demokrasi, fundamentalisme, lingkungan hidup yang berkaitan dengan, dan menjadi, tantangan agama-agama. Sisi-sisi terapan disiplin ini sangat bersifat partikular dan kontekstual. Disiplin ini di India akan sangat berbeda dengan di Indonesia, demikian juga dengan kawasan lainnya. Karena agama-agama yang hidup di masing-masing tempat itu berbeda, baik dalam watak sosiologi maupun perjalanan sejarah bermasyarakat yang mereka lalui. Selain perlu melakukan riset sendiri secara intensif, disiplin dialog antar agama yang diandaikan di sini perlu perlu juga memanfa-



Bagian istana Madina Tuzzakra

Sumber: Leksikon Islam

atkan hasil-hasil riset, terutama dari sosiologi, sejarah dan antropologi, sebagai bahan refleksi dialog. Bagaimanapun, hal ini merupakan konsekuensi logis dari dialog yang menyeluruh, yang tidak mengisolasi dari masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang melingkupi.

Harus diakui bahwa kegiatan dialog antar agama yang hampir tiga dasawarsa ini berlangsung sebenarnya sangat kurang melakukan refleksi. Refleksi terhadap perjalanan dialog antar agama sangatlah penting untuk meningkatkan substansi dari dialog itu sendiri. Refleksi dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana dialog telah dilakukan, perangkat teoritis maupun praktis apa yang dibutuhkan, aspek-aspek apa yang harus diikuti sertakan dan seterusnya. Tanpa refleksi, dialog menjadi semacam improvisasi. Singkatnya, refleksi merupakan otokritik untuk perbaikan dialog.

Karena kurangnya refleksi ini pulalah, kalangan praktisi dialog gampang tertimpa pesimisme, dan bahkan putus asa. Bukan semata karena kegiatan dialog terasa seperti "jalan di tempat", tapi juga berkenaan dengan munculnya banyak paradoks dan ironi dalam hubungan antar agama. Sementara dialog antar agama terus digelar, di berbagai tempat terjadi kekerasan dan kerusuhan bernuansa agama. Bahkan kadang peristiwa itu terjadi di depan hidung mereka, tanpa sama sekali bisa melakukan pembelaan. Sementara kerukunan beragama telah kita jadikan sebagai "ekspor non migas", dengan promosinya yang penuh bangga di manca negara, di dalam negeri kita justru terjadi hal yang sebaliknya. Dialog yang dilakukan menjadi terasa hambar. Oleh orang luar ia dianggap tak lebih sekedar pemelihara rasa aman sementara.

Bagaimanapun, sebenarnya pesimisme itu tidak perlu terjadi, jika kita telah siap dengan pengertian sepenuhnya mengenai dialog. Tidak ada rumusan bahwa dialog antar agama mampu menjamin tidak terjadinya konflik agama. Tapi hubungan antar agama jauh lebih tidak terjamin tanpa adanya komunikasi dan dialog yang intensif antar pemeluk agama-agama tersebut. Dengan tetap meninggalkan

keprihatinan yang dalam atas peristiwa-peristiwa tersebut, harus kita akui bahwa kerusuhan-kerusuhan bernuansa agama itu merupakan suatu hal, sementara dialog-dialog antar agama yang baru dibangun ini merupakan hal lain. Justru dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut kita meneguhkan keyakinan akan pentingnya membuka seluas mungkin komunikasi dan dialog antar pemeluk agama. Pengertian sepenuhnya akan pentingnya dialog antar agama dan persebarannya, akan kita peroleh keikutsertaan dalam dialog itu sendiri sekaligus refleksi terus menerus atasnya. Dialog antar agama sebagai disiplin yang saya maksud di atas, saya kira, sangat membantu untuk pemahaman teoritis terhadap kompleksitas dan multi-aspek masalah yang menyangkut hubungan antar agama.

Bacaan:

- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, 1997.
 B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1985.
 Burhan D. Magenda, "Perubahan dan Kesenambungan dalam Pembelaan Masyarakat di Indonesia", *Prisma*, No. 4, 1990.
 Djohan Effendi, "Dialog antar Agama: Bisakah Melahirkan Teologi Kerukunan?", *Prisma*, Juni 1978.
 Hans Kung, *Global Responsibility*, The Crossroad Publishing Company, New York, 1990.
 St. Sunardi, *Keselamatan Kapitalisme Kekerasan: Kesaksian atas Paradoks-paradoks*, LKIS, Yogyakarta, 1996.